



► KASUS SENGKETA

## PKL Malioboro Datangi PTUN Jogja

**BANTUL**—Sejumlah orang dari berbagai komunitas pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja, Selasa (22/1). Mereka datang untuk memberikan dukungan moral kepada Pemkot Jogja dan pihak terkait atas sengketa yang diajukan Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM).

Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKMM), Rudi Harto, mengatakan kedatangan para PKL tersebut sebagai bentuk dukungan moral atas kasus gugatan PPM kepada Pemkot dan Pemda DIY. "Kami bukan pihak yang ikut digugat. Hanya saja, dampak dari gugatan yang diajukan juga menyangkut kami. Oleh karena itu kami datang untuk memberikan dukungan moral, tidak ada orasi," katanya saat ditemui *Harian Jogja*, Selasa.

Kedatangan para pedagang dilakukan di

sela-sela mereka beraktivitas berjualan di Malioboro. Setelah sidang selesai mereka kembali ke Malioboro untuk berjualan. Banyaknya pedagang yang datang direspons dengan pengamanan dari Polsek Banguntapan dan Polres Bantul, "Kami siapkan 25 personel dari Polsek Banguntapan dan satu regu dari Polres Bantul. Pengamanan hanya antisipasi. Aksi berjalan damai, tertib. Kami tetap melakukan pengamanan pada persidangan selanjutnya," kata Kapolsek Banguntapan, Kompol Suhadi.

Sejumlah pedagang merasa geram dengan tindakan PPM yang menggugat Pemkot Jogja dan Pemda DIY. Pedagang menilai gugatan tersebut salah satunya bertujuan untuk mengusir PKL dari kawasan Malioboro. Menurut Rudi, PKL siap ditata tetapi tidak untuk digusur.


● Lebih Lengkap, Halaman 16

**PKL Malioboro...**

"PKL tidak bisa dilepaskan dari kawasan Malioboro," kata Rudi, Koordinator Forum Lintas Komunitas Malioboro, Edy Susanto, mengatakan hal sama. "Kami berkomitmen untuk terus mendatangi sidang hingga selesai. Setiap ada sidang kami akan datang," kata Edy.

Ketua PPM Budhi Susilo mengajukan gugatan ke PTUN Jogja terkait dengan penataan kawasan Malioboro. Meski gugatan sebelumnya ditolak PTUN, PPM kembali mengajukan gugatan kepada Wali Kota Jogja dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY.

Menurut pria yang biasa disapa Cuncun ini, Wali Kota Jogja dan Kepala UPT Malioboro diminta konsisten menjalankan aturan dalam Perda Kota Jogja No.26/2002 tentang Penataan PKL maupun Perwal No.37/2010. Adapun Kepala DPUP-ESDM DIY digugat karena dalam desain pedestrian Malioboro menampilkan lapak PKL di depan toko. "Sesuai Perwal 37/2010 pasal 11, PKL yang menempati lahan toko harus seizin pemilik toko. Padahal kami tidak pernah mengizinkan," ujarnya. (*Abdul Hamid Razak*)



Sejumlah PKL Malioboro saat mendatangi gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Banguntapan, Bantul, Selasa (22/1).

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			
3. Dinas PUPKP			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005